

Implementasi Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB
DI SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

Ayu Dila Sari

12040674034 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) ayudila14@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

00290774004 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) Prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu bentuk respon pemerintah dalam menanggapi masalah luntarnya pengetahuan dan penggunaan bahasa daerah sehingga dapat menyebabkan kualitas budi pekerti dan tata karma pemuda di Jawa Timur semakin menurun. Adanya Peraturan Gubernur tersebut bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah. Masalah implementasi yang terjadi di SMK Negeri Kertosono adalah kurangnya jumlah sumber daya dalam menunjang keberhasilan implementasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono dengan menggunakan teori dari George Edward III yang memiliki 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono sudah berjalan namun masih ada beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dari indikator komunikasi adalah kurang jelasnya penyampaian informasi mengenai kebijakan. Kemudian untuk indikator sumber daya yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam proses implementasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya kendala dari indikator disposisi adalah kurangnya insentif bagi guru bahasa daerah. Dan yang terakhir dari indikator struktur birokrasi adalah belum maksimalnya evaluasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk. Empat indikator tersebut menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono sudah berjalan namun perlu adanya beberapa perbaikan seperti peningkatan komunikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk kepada SMK negeri 1 Kertosono.

Kata Kunci : *implementasi, kebijakan, bahasa daerah*

Abstract

East Java Governor regulation Number 19 Year 2014 about Local Language Subject as Additional Lesson Obligatory was issued by the east java governor as one government response in response to their faded problems knowledge and the use of local language so that can cause the quality of the manners of a management and youth attitude in east java declining. The governor regulation was meant to preserve , develop and to creation language and literature regions. The problems of implementation in State Vocational High School (SMK) 1 Kertosono is a lack of resources in supporting succeeded of the implementation. The main purpose of this research is to described the implementation of East Java Governor regulation Number 19 Year 2014 about Local Language Subject as Additional Lesson Obligatory at School/Madrasah in State Vocational High School (SMK) 1 Kertosono.

The research is descriptive research with a qualitative approach .This study focused on implementation of East Java Governor regulation Number 19 Year 2014 about Local Language Subject as Additional Lesson Obligatory at School/Madrasah in State Vocational High School (SMK) 1 Kertosono. Using the theory of George Edward III having 4 indicator theres, the communication, resources, disposition, and structure of bureaucracy.

The result showed that implementation of East Java Governor regulation Number 19 Year 2014 about Local Language Subject as Additional Lesson Obligatory at School/Madrasah in State Vocational High School (SMK) 1 Kertosono was already undertaken however there are still some obstacles. The obstacles of communication indicator is the lack of clarity on the delivery of policy information. Then to resources indicators was the lack of number in human resources in the process of implementation both in terms of quantity or quality. The next obstacles of disposition indicator is the lack of incentives for teachers of local language. And the last of bureaucratic structure indicator is not pay evaluation conducted by the Dikpora of Nganjuk district . The four indicators of concluded that the implementation of East Java Governor regulation Number 19 Year 2014 about Local Language Subject as Additional Lesson Obligatory at School/Madrasah in State Vocational High School (SMK) 1 Kertosono has been done but also needs some improvements as the improvement from Dikpora of Nganjuk district to the State Vocational High School 1 Kertosono.

Keywords : *Implementation, policy, local language*

PENDAHULUAN

Dalam berinteraksi manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa. Bahasa merupakan unsur penting dari kebudayaan. Transformasi budaya yang berlangsung selama ini pun terjadi karena peran bahasa pula. Di dunia ini terdapat banyak bahasa yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi. Setiap wilayah maupun negara tentu memiliki bahasanya sendiri. Tidak terkecuali di Negara Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa. Kurang lebih terdapat 633 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia yang setiap suku memiliki bahasa daerahnya sendiri (www.bps.go.id). Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu suku memiliki bahasa yang berbeda misalnya, dalam suku Jawa terdapat perbedaan antara bahasa jawa di daerah Yogyakarta dengan bahasa jawa di daerah Surabaya.

Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa komunikasi yang digunakan secara khusus oleh masyarakat di daerah Jawa. Beberapa ahli juga memberikan penjelasan mengenai bahasa jawa. Yang pertama, menurut Ahira (2010), Bahasa Jawa merupakan bahasa pergaulan, yang digunakan untuk berinteraksi antar individu dan memungkinkan terjadinya komunikasi dan perpindahan informasi sehingga tidak ada individu yang ketinggalan zaman. Kedua, menurut Hermadi (2010).

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, Bahasa Jawa mulai kurang mendapat minat dari anak bangsa daripada Bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya seperti Bahasa Inggris. Terdapat beberapa penyebab dari permasalahan tersebut, yang pertama yaitu penggunaan Bahasa Jawa di lingkungan rumah tidak seketat seperti di masa-masa dulu. Hal tersebut dikarenakan orang tua tidak lagi membiasakan anaknya untuk menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi di lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu adanya sikap negatif dari

generasi muda yang berpandangan dan menganggap bahasa jawa sebagai bahasa orang-orang desa, orang udik, orang-orang pinggiran, atau orang-orang zaman dulu. Sehingga mereka merasa malu dan gengsi untuk menggunakan Bahasa Jawa dan memilih menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya (www.kompasiana.com).

Dengan adanya fenomena tersebut, Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 April 2014 menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah. Peraturan tersebut memiliki maksud sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan estetika, etika, moral, spiritual, dan karakter sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3. Sedangkan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut yaitu untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4.

Langkah awal yang sudah dilakukan dalam implementasi peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah yaitu adanya sosialisasi di masing-masing daerah yang terdapat di Jawa Timur. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1.1
Daftarsekolah Kejuruan Negeri se-
Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2015/2016

No.	Nama Sekolah	Jumlah Jurusan	Jumlah Siswa
1.	SMKN 1 Nganjuk	9	1321 siswa
2.	SMKN 1 Gondang	7	1271 siswa
3.	SMKN 1 Kertosono	5	1155 siswa
4.	SMKN 2 Nganjuk	4	1107 siswa
5.	SMKN 1 Bagor	6	1105 siswa
6.	SMKN Tanjunganom	4	932 siswa
7.	SMKN Lengkong	3	842 siswa
8.	SMKN 2 Bagor	4	659 siswa

Sumber: Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk

Implementasi Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa SMK Negeri 1 Kertosono merupakan SMK Negeri yang memiliki jumlah siswa terbanyak ketiga di Kabupaten Nganjuk. SMK Negeri 1 Kertosono juga termasuk dalam salah satu sekolah yang turut serta melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014. Namun, dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah pada SMK Negeri 1 Kertosono masih belum dilaksanakan secara menyeluruh di semua jurusan.

Adanya permasalahan yang telah disebutkan diatas dapat menjadi suatu hambatan dalam tercapainya tujuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono. Maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi Muatan Lokal Bahasa Daerah di SMKN 1 Kertosono apakah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang ada, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Peraturan gubernur Jawa timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagi Muatan Lokal Wajib di sekolah/Madrasah pada Sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono karena pada SMK Negeri 1 Kertosono terdapat kendala-kendala dalam proses implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014.

Fokus yang dipakai dalam penelitian ini adalah model implementasi dari George Edward III yang memiliki 4 indikator penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Subyek penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sebagai pendukung dalam memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono. Dalam menentukan subyek penelitian digunakan teknik *purposive sampling*. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kurikulum tingkat SMA dan SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk, Wakil Kepala Kurikulum SMK Negeri 1 Kertosono, Guru Bahasa Daerah

SMK Negeri 1 Kertosono, dan beberapa Siswa SMK Negeri 1 Kertosono yang menerima amta pelajaran bahasa daerah

Sumber data merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Melalui sumber data, segala hal yang diperlukan dalam penelitian akan diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

- a. Kepala Bidang Kurikulum Tingkat SMA dan SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Nganjuk (Bapak Suyitno), yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyampaian informasi dari dinas ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk.
- b. Wakil Kepala Kurikulum SMKN 1 Kertosono (Bapak Heru), yaitu untuk mengetahui proses implementasi mata pelajaran bahasa daerah kepada guru dan juga siswa di SMKN 1 Kertosono.
- c. Guru Bahasa Daerah SMKN 1 Kertosono (Bapak Misbakhul Munir), yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran muatan lokal bahasa daerah dan mengetahui kendala yang dihadapi.
- d. Siswa SMKN 1 Kertosono (kelas X-Listrik 2 Lutfi Anugrah saputra, kelas X-Otomasi Industri 1 Dicky Setyawan. Kelas XI-Listrik 1 Febri Krismiati, kelas XI-Otomasi Industri 2 Yudha Pamnungkas. Kelas XII-Listrik 1 Isa Aldino, kelas XII-Otomasi Industri 1 Achmad Irfan), yakni untuk mengetahui respon siswa mengenai penerapan muatan lokal bahasa daerah serta dampak yang mereka rasakan.

2. Data Sekunder

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi resmi yang dapat mendukung data primer. adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :
- b. Data mengenai jumlah Guru dan Siswa di SMKN 1 Kertosono
- c. Data mengenai kegiatan dan jadwal pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah.
- d. Foto – foto dokumentasi penelitian, dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (1999:201) teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat agar didapat data yang valid dan reliable. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa teknik agar diperoleh data yang lengkap dan

objektif, diantaranya : Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah /Madrasah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk

Hasil

A. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam implementasi kebijakan agar pelaku dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan. Dengan adanya komunikasi, pelaku kebijakan juga dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, sehingga implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat tiga sub indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan indikator komunikasi dalam penerapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah pada SMK Negeri 1 Kertosono, yaitu :

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyampaian komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miss communication*), hal tersebut biasa terjadi karena sebagian komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 secara vertikal hingga sampai ke sekolah-sekolah. Sebelum Peraturan Gubernur tersebut sampai di setiap sekolah yang ada di Jawa Timur, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dari Dinas Pendidikan di masing-masing daerah sebagai sarana penyaluran informasi.

2. Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud dalam indikator komunikasi memfokuskan pada informasi yang diperoleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

3. Konsistensi

Intruksi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten atau tidak berubah-ubah. Jika intruksi yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan.

B. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada sumber daya sebagai pendukung kebijakan. Oleh sebab itu

adanya sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting. Dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono, variabel sumber daya terbagi menjadi beberapa sub indikator yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, karena tanpa sumber daya manusia, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya anggaran yang memadai, suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuannya.

3. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

C. Disposisi

Disposisi yang dimaksud berkaitan dengan bagaimana sikap dari pelaksana dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Disposisi dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sikap

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan didasari oleh sikap yang positif terhadap kebijakan, maka besar kemungkinan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

2. Insentif

Insentif merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi baik buruknya implementasi kebijakan. Apabila insentif yang diberikan baik, maka pelaksanaan kebijakan akan baik. Sebaliknya, apabila insentif yang diberikan kurang, maka akan mempengaruhi buruknya implementasi kebijakan.

D. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung akan melemahkan pengawasan

Implementasi Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk

dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien. Terdapat dua indikator dalam variabel struktur birokrasi, yaitu :

1. SOP (*Standart Operational Procedure*)

Standart Operational Procedure atau prosedur pelaksanaan menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak agar implementasi kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas diantara beberapa unit kerja dalam implementasi kebijakan.

Pembahasan

Peraturan Gubernur Jawa Timur merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan berdasarkan wewenang kepala daerah tingkat provinsi disebut Gubernur. Peraturan Gubernur Jawa Timur ini hanya berlaku untuk wilayah Provinsi Jawa Timur atau sesuai dengan daerah kepemimpinan Gubernur. Pada tanggal 3 April 2014 di Kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur telah menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah atau madrasah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah memiliki maksud dan tujuan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, etetika, moral, spiritual, karakter serta melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, secara otomatis Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/188/KPTS/013/2005 tentang kurikulum mata pelajaran bahasa jawa untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan swasta provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kertosono adalah salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang memiliki jumlah siswa terbanyak ketiga di Kabupaten Nganjuk setelah SMK Negeri 1 Nganjuk dan SMK Negeri 1 Gondang. SMK Negeri 1 Kertosono.

Implementasi peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono akan dikaji dengan menggunakan model implementasi oleh George Edward III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam implementasi kebijakan agar pelaku dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan.

Dengan adanya komunikasi, pelaku kebijakan juga dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, sehingga implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupaya untuk menyampaikan informasi mengenai Peraturan Gubernur tersebut kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk melalui sosialisasi. Namun pihak SMK Negeri 1 Kertosono justru menjelaskan bahwa mereka tidak memperoleh sosialisasi apapun dari pihak Dikpora. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa transmisi atau penyampaian informasi dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 masih belum baik sehingga pihak SMK Negeri 1 Kertosono hanya melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut dengan informasi seadanya.

Terkait kejelasan informasi pada pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono diketahui bahwa pihak Dikpora telah memberikan informasi melalui sosialisasi tentang peraturan gubernur tersebut dengan jelas. Namun, kenyataan yang berbeda dialami oleh pihak SMK Negeri 1 Kertosono dimana informasi yang diperoleh pihak sekolah masih kurang jelas. Hal tersebut dikarenakan pihak SMK Negeri 1 Kertosono memperoleh informasi mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 sangat terbatas. Maksud dan tujuan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tersebut juga di dapatkan pihak sekolah melalui internet saja.

Pada sub indikator selanjutnya yaitu konsistensi, diketahui bahwa konsistensi dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak berubahnya pedoman yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan. Baik pihak Dikpora maupun pihak SMK Negeri 1 Kertosono memiliki pendapat yang sama bahwa tidak berubahnya pedoman yang digunakan disebabkan oleh belum adanya peraturan baru yang mengatur pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di Jawa Timur.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono sumber daya manusia yang dimaksud ialah guru mata pelajaran bahasa daerah. Dalam hal kuantitas sumber daya, guru mata pelajaran bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kertosono jumlahnya masih kurang. Hanya ada satu guru mata pelajaran bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kertosono. Kurangnya jumlah guru yang mengajar bahasa

daerah menyebabkan pembelajaran bahasa daerah hanya diajarkan pada 2 jurusan saja yaitu jurusan Listrik dan jurusan Otomasi Industri, padahal di SMK Negeri 1 Kertosono terdapat 5 jurusan.

Dalam hal kualitas, guru bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kertosono bukan berasal dari lulusan sastra jawa, melainkan berasal dari lulusan pendidikan agama islam. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 masih kurang berkompeten.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, sikap yang ditunjukkan oleh pihak SMK Negeri 1 Kertosono yaitu mendukung penuh pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah. Bentuk dukungan yang dilakukan pihak SMK Negeri 1 Kertosono adalah dengan mencari tenaga pendidik/guru untuk mata pelajaran bahasa daerah. Guru bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kertosono juga turut serta mendukung pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah. Bentuk dukungan yang diberikan oleh guru bahasa daerah adalah dengan cara pembelajaran yang dilakukan sebaik mungkin, misalnya dalam hal kedisiplinan ketika mengajar dan pembelajaran yang menyenangkan. Namun, bila di kaitkan dengan strategi pembelajaran menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 masih belum terlaksana secara keseluruhan. Hal ini di karenakan SMK Negeri 1 Kertosono masih belum menggunakan strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM)

Sikap yang positif dalam implementasi kebijakn perlu juga didukung dengan insentif yang layak. Insentif dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono dapat dikatakan masih kurang layak. Guru bahasa daerah hanya digaji sebesar Rp.6000 per satu jam pelajaran, jika diakumulasikan setiap bulannya guru bahasa daerah hanya menerima gaji kurang lebih sebesar Rp.500.000. Jumlah insentif yang sangat minim masih dirasa kurang oleh guru bahasa daerah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlepas dari hal tersebut guru bahasa daerah tetap berusaha melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono prosedur pelaksanaan atau SOP berdasar kepada Peraturan Gubernur itu sendiri. SMK Negeri 1 Kertosono telah melaksanakan pembelajaran bahasa daerah sesuai dengan apa yang ada pada Peraturan Gubernur tersebut, meskipun pihak sekolah mengakui bahwa pelaksanaannya masih belum sampai 100%.

Fragmentasi atau pembagian tugas dan wewenang dalam implementasi Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono dapat dikatakan sudah cukup sesuai dengan SOP. Pelaksana kebijakan dari pihak SMK Negeri 1 Kertosono telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Hanya saja masih terdapat kekurangan dalam hal evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dikpora. SMK Negeri 1 Kertosono belum pernah menerima evaluasi dari pihak Dikpora Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya untuk guru bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kertosono telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan penilaian kepada siswa dan juga bertugas untuk membuat silabus. Silabus yang dibuat disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014, bahwa nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, karakter dan spiritual terkait pembelajaran bahasa daerah telah diajarkan di SMK Negeri 1 Kertosono.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Komunikasi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Nganjuk melalui sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Namun dalam sub indikator transmisi atau penyampaian informasi belum berjalan dengan baik. Hal serupa juga terjadi pada sub indikator kejelasan informasi dimana SMK Negeri 1 Kertosono memperoleh informasi hanya melalui internet saja sehingga informasi yang diterima masih kurang jelas. Namun pada sub indikator konsistensi sudah berjalan dengan cukup baik karena intruksi mengenai pelaksanaan pembelajaran tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 dan belum berubah hingga sekarang.

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 di SMK Negeri 1 Kertosono dilihat pada indikator sumber daya juga belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa pada sub indikator sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan di SMK Negeri 1 Kertosono masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian pada sub indikator sumber daya anggaran sudah berjalan dengan cukup baik. Pada sub indikator yang ketiga yaitu sumber daya fasilitas sudah terpenuhi dengan cukup baik.

Pada indikator disposisi, sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan yaitu pihak SMK Negeri 1 Kertosono mendukung penuh pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di seluruh sekolah/madrasah. Namun, dalam sub indikator insentif masih dianggap kurang karena gaji yang

Implementasi Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk

diterima oleh guru bahasa daerah masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada indikator yang terakhir yaitu Struktur Birokrasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kertosono telah berjalan cukup baik. SOP yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah sudah jelas yaitu berdasar pada Peraturan Gubernur itu sendiri. Dalam hal fragmentasi atau pembagian tugas dan wewenang juga sudah berjalan cukup baik dan jelas.

Saran

Melalui hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Komunkasi antara pihak Dikpora Nganjuk dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk harus ditingkatkan dengan cara diadakan evaluasi setiap minimal akhir semester dimana Dikpora harus mengundang seluruh perwakilan sekolah untuk membahasa apa saja yang dialami sekolah-sekolah dalam proses pembelajaran bahasa daerah.
2. SMK Negeri 1 Kertosono sebaiknya menambah jumlah guru untuk mata pelajaran bahasa daerah agar bahasa daerah dapat diajarkan disemua jurusan. Guru bahasa daerah yang akan diterima harus memiliki kualitas dan berasal dari lulusan program pendidikan yang sesuai.
3. SMK Negeri 1 Kertosono sebaiknya meningkatkan insentif bagi guru bahasa daerah agar pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah lebih maksimal lagi.
4. Guru bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kertosono seharusnya menerapkan strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) agar tujuan dari Kebijakan dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Atmaja, Uddin Wirya. 2014. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Juwet Kenongo Porong*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Negeri Surabaya

Burhan, Bugin. 2009. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press

Febriyanti, Nurita. 2014. *Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Negeri Surabaya

Milles, Mathew B, dkk. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press

Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Di sekolah/Madrasah.pdf

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2010, *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta

Tabrani, Mohammad Royan. 2015. *Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Negeri Surabaya

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing

- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Mengulik Data Suku di Indonesia*. (<http://www.bps.go.id/index.php/kegiatanLain/127>, diakses pada tanggal 6 Januari 2016)
- Data Referensi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016. *JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PER KABUPATEN/KOTA*. (<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=051400&level=2>, diakses pada tanggal 1 Januari 2016)
- Kompasiana. 2016. *Alasan Kenapa Lebih Memilih SMK dibanding SMA*. (http://www.kompasiana.com/len/alasan-kenapa-lebih-memilih-smk-dibandingkan-sma_56f0b65f709773c606c6b653, diakses pada 22 April 2016)
- Kompasiana. 2013. *Penerapan Bahasa Daerah pada Kurikulum 2013*. (http://www.kompasiana.com/masbrek/penerapan-bahasa-daerah-pada-kurikulum-2013_552beb0c6ea834b7638b457e, diakses pada tanggal 22 April 2016)
- Kompasiana. 2014. *Penggunaan Bahasa Jawa untuk Melestarikan Warisan Budaya Indonesia dalam Lingkup Pemuda Jawa*. (http://www.kompasiana.com/penggunaan-bahasa-jawa-untuk-melestarikan-warisan-budaya-indonesia-dalam-lingkup-pemuda-jawa_54f7563ca3331184358b45e6, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015)
- Republika Online. 2014. *Bahasa Daerah Semakin Punah*. (<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/03/04/n1wzn0-bahasa-daerah-semakin-punah>, diakses pada tanggal 25 Januari 2016)
- Surya Online. 2014. *Mulai Tahun Ini, Siswa SMA Dapat Materi Pelajaran Bahasa Daerah*. (<http://surabaya.tribunnews.com/2014/08/16/sekolah-diminta-cari-buku-pelajaran-bahasa-daerah-sendiri>, diakses pada tanggal 8 September 2015)